

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia sedang digalakkan pembangunan nasional yang menyeluruh disegala bidang. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo dan Wirawan, 2000).

Penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan satu partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan kelangsungan penyelenggaraan kehidupan pemerintah. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional adalah pajak bumi dan bangunan. Karena pajak bumi dan bangunan merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimanya merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2003).

Pada umumnya pajak bumi dan bangunan meliputi lima sektor, yaitu: sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Salah satu sektor pajak bumi dan bangunan yang memiliki aset cukup diperhitungkan adalah pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, mengingat letak geografis negara Indonesia sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani/bercok tanam. Oleh karena itu

penunggakan pajak bumi dan bangunan yang terjadi pada sektor ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan adalah pajak bumi dan bangunan yang objeknya berada di wilayah pedesaan dengan data terdaftar dalam wilayah desa (M. Isnanto, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) Pasal 80 yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan hasilnya akan diserahkan kepada daerah, oleh karena itu desa sebagai unsur pemerintahan paling rendah menentukan berhasil atau tidaknya penarikan pajak sesuai dengan rencana seperti tepat waktu, jumlah pajak, tunggakan maupun kepedulian masyarakat terhadap arti penting membayar pajak (Mimbar, 1998).

Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 973/518/KEP/2004 Tanggal 1 November 2004 tentang Penunjukan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kebumen yang memutuskan bahwa Kepala Desa sebagai petugas pemungut pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, untuk itu keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam sektor ini ditentukan pada kinerja aparat pemerintah desa.

Organisasi apapun, baik militer, berorientasi pada produk, berorientasi pada jasa, pemerintah atau bahkan olahraga harus melakukan strategi agar menang. Serangan yang baik tanpa pertahanan yang baik atau sebaliknya biasanya menyebabkan kekalahan (David, 2002).

Begitu pula halnya organisasi pemerintah desa yang harus melakukan strategi agar keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor

pedesaan dapat tercapai. Proses pengambilan strategi dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2006).

Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang memiliki luas wilayah 162.400 Ha, dari luas wilayah tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Dari pemanfaatan lahan itulah desa Banjarsari mampu memberikan sumbangan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk wilayah Kabupaten Kebumen sebesar Rp 33.427.050,- pada tahun 2005. Jumlah penerimaan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2001, dimana jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kantor Desa Banjarsari pada tahun 2001 sebesar Rp 13.026.384,-. Adapun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kantor Desa Banjarsari selama tahun 2001 sampai dengan 2005 adalah sesuai dengan yang ditargetkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP PBB) Kabupaten Kebumen, yang berarti bahwa selama lima tahun terakhir tidak terdapat tunggakan. Keberhasilan ini disebabkan adanya peran aktif pemerintah desa Banjarsari dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan kepada masyarakat desa Banjarsari.

Supaya Kantor Desa Banjarsari tetap mempertahankan keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka pemerintah desa tersebut harus

mampu mengambil keputusan strategi untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.

Melihat pentingnya keputusan strategi yang diambil oleh pemerintah desa terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan demi kelangsungan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul: **“Analisis SWOT Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan (Studi Kasus di Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Untuk memperjelas dan memudahkan variabel-variabel yang akan diteliti penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini sebagai respondennya adalah aparat pemerintah desa sebagai petugas yang terkait secara langsung dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, meliputi: kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur) keuangan, kepala urusan (kaur) umum dan kepala dusun (kadus).
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen untuk tahun 2001 sampai dengan 2005.
3. Variabel internal dalam penelitian ini meliputi: saluran distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), efektivitas kerja, hubungan kinerja

atasan dengan bawahan, kerja sama, kualitas pelayanan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut pajak, dan fasilitas kantor.

4. Variabel eksternal yang diteliti berupa lingkungan makro dan mikro meliputi: kondisi perekonomian nasional, perubahan teknologi, penyuluhan pajak, kesadaran perpajakan, peraturan (hukum) pajak, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan masyarakat selaku Wajib Pajak.
5. Analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi sel kantor desa sehubungan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan adalah analisis SWOT.
6. Dari posisi sel kantor desa dapat diketahui alternatif strategi yang tepat dengan menggunakan Matrik SWOT atau TOWS.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*) Kantor Desa Banjarsari terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan?
2. Strategi apa yang digunakan Kantor Desa Banjarsari terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*) Kantor Desa Banjarsari terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan Kantor Desa Banjarsari terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Manfaat dibidang teoritis:
 - a. Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengambilan strategi pada kantor desa demi tercapainya keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan analisis SWOT terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.
2. Manfaat dibidang praktik:
 - a. Bagi pihak lain, dengan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan mengenai strategi dalam pencapaian keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan.

- b. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk terus meningkatkan kinerja pemerintah desa selaku petugas pemungut pajak.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan hal yang sangat berarti untuk memperluas pengetahuan serta mengembangkan ilmu akuntansi khususnya perpajakan.